



**KOALISI NEGARA TELUK DIAM ATAS PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA KEPADA *IKHWANUL MUSLIMIN*
PASCA KUDETA MILITER 2013 DI MESIR**

Jadug Trimulyo Ainul Amri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Situs Web : <http://www.fisip.undip.ac.id>

ABSTRACT

This research aims to explain and analyze responses from the Gulf Cooperation Council towards the violation of human rights in Egypt post-military coup d'etat in 2013. Democracy comes with a high price in Egypt. However in 2012, a presidential election was held for the very first time in the history of the Egyptian state establishment where Mohamed Morsi was elected as a head of state. Mursi came from Freedom and Justice Party, a political party founded by Ikhwanul Muslimin. After the first year of his incumbent, Morsi was overthrown through a military coup led by General Abdul Fattah Al Sisi in 2013. This event caused a political crisis in Egypt, demonstrations emerged within the entire country and received repressive responses from the military regime. Thousands of people were killed, imprisoned and executed without a fair trial. The international community has condemned the human rights violation that was occurring however, the Gulf countries such as Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, and Oman tended to turn a blind eye towards this issue. In fact, supportive responses were shown towards the ruling regime with Qatar as the only country with an opposite response. As a result, Ikhwanul Muslimin was banned in almost the entire Middle Eastern region.

Keywords: Ikhwanul Muslimin, President Morsi, human rights violation, Gulf Cooperation Council, Egypt, Saudi Arabia, Qatar

Pendahuluan

Sejak berdirinya, *Ikhwanul Muslimin* berkembang dengan pesat di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti di Yordania, Palestina dengan Hamas-nya merupakan pengembangan dari cabang Yordania, Tunisia, Libya, Suriah serta negara teluk lain (Hassan, 2012). Pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser, *Ikhwanul Muslimin* mengalami berbagai penindasan dan sebagian tokohnya melarikan diri ke Arab Saudi dan negara teluk lain untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi (Kepel, 2006). Namun dalam perkembangannya para mufti Arab Saudi yang beraliran Wahabi menganggap yang disampaikan para tokoh *Ikhwanul Muslimin* berbahaya bagi identitas Arab Saudi dan puncaknya awal awal dekade terakhir abad ke-21 dengan maraknya kampanye anti *Ikhwanul Muslimin* meluas mengakibatkan berbagai tindakan kriminalisasi terhadap orang-orang *Ikhwanul Muslimin* (Dacrema, 2013).

Akhir 2010 hingga 2011, wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dihadapkan pada sebuah pergolakan politik yang disebut sebagai *The Arab Spring*. Revolusi itu telah berhasil menumbangkan penguasa diktator Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun. Lengsernya Husni Mubarak pada tahun 2011 menandakan awal mula berdirinya sistem demokrasi di Mesir. Melalui pemilihan umum maka terpilih Mohamed Mursi dari

Ikhwanul Muslimin sebagai presiden Mesir yang dipilih secara demokratis pertama sepanjang sejarah. Pemerintahan Presiden Mursi berjalan dalam stabilitas nasional yang belum membaik pasca revolusi, terlebih persetujuan dengan partai oposisi *National Salvation Front* (NSF). Dialog antara pemerintah dan oposisi sulit mencapai kesepakatan, bahkan sulit diupayakan. Hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa hal diantaranya karena militer yang berada dibawah presiden pasca revolusi, pengusutan kerusuhan selama revolusi berlangsung, penggantian kabinet dan amandemen konstitusi yang semakin berdasar pada Islam. *Ikhwanul Muslimin* merasa bahwa puluhan demonstrasi yang terjadi tidak akan berdampak pada posisi Presiden Mursi, diperkuat dengan keyakinan bahwa Abdel Fattah Al Sisi berada di pihak mereka. Tanpa diduga yang sedang dihadapi bukan semata oposisi namun kekuatan militer Mesir. Sehingga Presiden Mursi jatuh oleh kekuatan militer dibawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al Sisi (Kompas.com, 2013).

Kudeta militer di Mesir pada 2013 mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia¹, diantaranya adalah pengekangan kebebasan berekspresi dengan menahan 18 wartawan dan puluhan lainnya dibebaskan dengan jaminan, bahkan ada satu jurnalis yang dijatuhi hukuman mati karena dituduhkan menyebarkan berita palsu dan penghasutan. Sebagai contoh Mahmoud Abu Zeid yang dihukum penjara tanpa pengadilan. Hal ini jelas menunjukkan kemungkinan pemerintahan baru melakukan pembungkaman kepada media yang kritis (Amnesty International, 2015).

Penahanan, penangkapan, dan pelarangan aktivis serta organisasi marak dilakukan. Setidaknya 22.000 orang ditangkap termasuk 3000 pimpinan *Ikhwanul Muslimin* (The Jordan Times, 2014). Bahkan menurut organisasi HAM Mesir menerangkan setidaknya 41.000 orang ditangkap dan dijatuhi hukuman dalam kurun waktu bulan Juli 2013 hingga bulan Mei 2014 termasuk 300 pengacara karena diduga menjadi anggota dan simpatisan terhadap *Ikhwanul Muslimin* (WikiThawra, 2014). Puncaknya pada bulan Desember 2013, *Ikhwanul Muslimin* dikategorikan sebagai “organisasi teroris”. Peradilan massal dan tidak adil marak terjadi dan asas praduga tidak bersalah tidak dihormati (Amnesty International, 2015). Banyak kasus lain yang serupa dan melibatkan warga negara asing juga.

Hal yang menarik terjadi dimana dunia internasional mengutuk kekerasan yang terjadi di Mesir, sebaliknya negara-negara teluk malah mendukung tindakan penggulingan Presiden Mursi. Raja Arab Saudi, Abdullah menjadi kepala negara pertama yang memberi ucapan selamat dan mengakui Presiden Adli Mansur sebagai Presiden Mesir yang baru. Raja Abdulloh menjanjikan bantuan 5 miliar USD kepada Mesir setelah penggulingan Mursi, bahkan bersama negara-negara teluk melalui menteri luar negerinya menyatakan negara-negara Arab adalah negara yang sangat kaya dan siap membantu Mesir jika negara-negara barat menghentikan bantuan kepada Mesir (Kompas.com, 2013). Langkah ini diikuti negara teluk lain seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait (Al Jazeera's Agencies, 2013). Berbeda dengan negara teluk lain, Qatar melalui kementerian luar negerinya justru mengutuk dengan keras kekerasan yang terjadi di Mesir dan menyerukan otoritas Mesir untuk menahan diri.

Pembiaran seperti yang dilakukan oleh koalisi negara teluk bukan hal yang baru di dunia internasional. Sebut saja di Indonesia mengenai Timor Leste (Amnesty International, 2017), Bahrain pada saat *Arab Springs* (Amnesty International, 2016) dan Rusia di Crimea (Amnesty International, 2016) pernah mengalami hal serupa. Maka bahasan mengenai respon minimal negara terhadap pelanggaran HAM di negara lain akan menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

¹ Berdasarkan Statuta Roma dan ICCPR

Pembahasan

Respon Terbatas Negara Teluk terhadap Pelanggaran HAM dalam Kudeta Militer 2013

Penggulingan Presiden Mursi menimbulkan gejolak besar dan berkepanjangan. Setelah penggulingan parade demonstrasi terjadi diseluruh negeri, mulai dari rakyat kecil, pengusaha, akademisi bersama dengan pendukung Presiden Mursi melakukan protes besar-besaran menentang kudeta militer. Krisis politik dalam negeri Mesir pasca kudeta penggulingan Presiden Mursi diperparah dengan penyikapan pemerintah baru terhadap para demonstran. Militer bersikap represif terhadap para demonstran, pembunuhan menjadi pemandangan yang mudah ditemukan di Mesir pasca penggulingan tersebut. *Amnesty International* mencatat pelanggaran HAM secara masif terjadi di Mesir selama krisis berlangsung, bahkan pada tanggal 14 Agustus 2013, sekitar 1000 anggota *Ikhwanul Muslimin* beserta para pendukung Presiden Mursi meninggal dalam pembubaran paksa aksi duduk mereka di Kairo. Lebih lanjut dikatakan oleh *Amnesty International*, sejak penggulingan Mursi, sistem peradilan pidana Mesir dijadikan alat untuk menekan perbedaan pendapat. Hukuman mati massal telah dijatuhkan oleh pengadilan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan persidangan yang sangat tidak adil (*Amnesty International*, 2014).

Pasca penggulingan Presiden Mursi dan secara langsung diikuti demonstrasi besar-besaran yang menghasilkan berbagai pelanggaran HAM terjadi, Saudi menyambut baik penggulingan tersebut. Tanpa memberi simpati terhadap pelanggaran HAM, Raja Abdullah² memberi bantuan kepada pemerintah baru Mesir sebesar 5 miliar USD dan mendukung pemerintah baru Mesir dalam melawan “teroris”. Saudi turut menyerukan kepada negara lain untuk mendukung pemerintah baru Mesir, melalui pernyataannya :

"The Kingdom of Saudi Arabia, its people and government stood and stands by today with its brothers in Egypt against terrorism." "I call on the honest men of Egypt and the Arab and Muslim nations... to stand as one man and with one heart in the face of attempts to destabilize a country that is at the forefront of Arab and Muslim history," (*Al Jazeera and Agencies*, 2013).

Senada dengan Saudi, satu tahun Jenderal Al Sisi berkuasa, media opisisi Mesir membuat pernyataan yang menguncang tentang adanya intervensi asing dalam penggulingan Presiden Mursi pada 2013. Seperti yang dilaporkan David Kirkpatrick melalui *The New York Times* bahwa saluran satelit bernama *Mekameleen* yang berbasis di Istanbul membocorkan sebuah rekaman percakapan anantara Jenderal Abbas Kamel, kepala ajudan Jenderal Al Sisi dengan Jenderal Sedky Sobhy yang menjabat sebagai Kepala Staf Militer dan Menteri Pertahanan setelah kejatuhan Presiden Mursi. Dalam rekaman percakapan tersebut kedua jenderal membicarakan tentang bantuan pendanaan Uni Emirat Arab untuk melakukan protes agar kekuasaan Presiden Mursi segera berakhir. Seperti kutipan perkataan Jenderal Kamel kepada Jenderal Sobhy dalam rekaman tersebut: “*Sir, we will need 200 tomorrow from Tamarod’s account — you know, the part from the U.A.E., which they transferred.*” (*The New York Times*, 2015).

Sebagai keterangan, *Tamarod* adalah sebutan untuk sebuah protes besar pada 30 Juni 2013 yang menuntut pengunduran diri Presiden Mursi, dua hari sebelum kudeta militer berlangsung. Meski rekaman tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dan pemerintah membantah kebenaran rekaman. Namun cukup masuk akal untuk menjelaskan respon Uni Emirat Arab yang abai terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir pasca penggulingan Presiden Mursi.

² Raja Arab Saudi (1 Agustus 2005-23 Januari 2015)

Bahrain menyebut tindakan militer tersebut sebagai langkah yang memang seharusnya diambil demi memulihkan perdamaian dan stabilitas dalam negeri. Lebih lanjut dukungan penuh Bahrain tercermin dengan membela tindakan militer Mesir sebagai langkah untuk mengembalikan hak-hak warga Mesir (The Hindu Business Line, 2013). Kuwait dan Oman tidak hanya mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi namun juga mendukung pemerintah baru Mesir dengan memberi bantuan keuangan tepat ketika krisis kemanusiaan sedang berlangsung (Reuters, 2015). Sedangkan Qatar menjadi satu-satunya negara di kawasan yang menyampaikan simpati atas pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir namun Qatar memberi ucapan selamat kepada Adli Mansour yang dilantik sebagai presiden interim Mesir dengan mengatakan bahwa mereka menghormati Mesir beserta rakyat Mesir ditengah dinamika yang terjadi (Al Jazeera, 2013).

Dinamika Pola Relasi Ikhwanul Muslimin dan Pemerintah Mesir

Ikhwanul Muslimin didirikan pada 1928 oleh seorang guru sekolah dasar di kota pelabuhan tepi terusan Suez, Ismailiah. Hingga menjelang meninggalnya Raja Fuad I pada 28 April 1936, *Ikhwan* merupakan organisasi yang berfokus dalam perbaikan moral dan sosial yang berlandaskan Islam “piagam” pendiriannya 1928 yang menyatakan ketidaklibatan dalam urusan politik dan tidak terafiliasi dengan organisasi politik tertentu (Dzakirin, 2015). Namun pada tahun yang sama, dimana terjadi perlawanan Arab di Palestina dimana *Ikhwan* tergerak untuk mengirim ribuan anggotanya turut berjuang di Palestina yang menandai transformasi arah gerak *Ikhwan* menjadi sebuah entitas politik (Juli, 2007).

Menjelang dan setelah perang dunia kedua merupakan masa dimana perselisihan antara *Ikhwan* dan pemerintah Mesir mulai mewarnai perpolitikan nasional Mesir secara makro. Dalam teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, *Ikhwan* dan pemerintah Mesir sebagai agen memiliki kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung ‘derutinisasi’. Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan, sumber daya, tindakan serta praktik sosial agen dalam struktur tidak lagi memadai untuk dipakai sehingga diperlukan praktik baru (Giddens, 1984). Sebagai contoh beberapa Perdana Menteri Mesir didukung oleh *Ikhwan* namun seringkali ditemukan ketidaksepemahaman dalam keberjalanannya, seperti PM Ali Maher Pasha yang membawa Mesir berperang melawan Jerman dan Italia serta mendukung Inggris meski sebelumnya berjanji akan bersikap tidak memihak dalam perang dunia.

Akademisi Mesir, Hamid Abdul Majid menjelaskan sejarah hubungan antara *Ikhwanul Muslimin* dengan rezim penguasa dapat disimpulkan dalam pola relasi aliansi dan diakhiri dengan dengan konfrontasi. Raja Faruq mengakomodasi pergerakan *Ikhwan* dari tahun 1942 hingga 1947, kemudian menindas *Ikhwan* hingga revolusi 1952. Nasser mengakomodasi dari tahun 1952 hingga pemberangusan yang terjadi pada tahun 1954 dan berakhir pada 1970. Sedangkan Anwar Sadat mengakomodasi *Ikhwan* diawal kekuasaannya pada 1970, dilanjutkan dengan penindasan hingga terbunuhnya Sadat pada tahun 1981 (Awadi, 2004). Pola relasi yang demikian berlanjut hingga jatuhnya Mubarak.

Perebutan Dominasi Struktur di Semenanjung Arab

Ikhwanul Muslimin memiliki semangat dan ideologi yang diterima oleh masyarakat muslim dunia, hal ini dibuktikan dengan cabang-cabang *Ikhwan* yang terbentuk diberbagai Negara. Berkembangnya internasionalisme *Ikhwan* dapat dipandang oleh Lorenzo Vidino (2010) bahwa *Ikhwan* sebagai sebuah organisasi pergerakan tidak bersifat monolitik dan menganut aturan hirarki yang rigid melainkan organisasi yang bersifat dinamis.

Kedinamisan ini menjadi alasan mengapa *Ikhwan* dapat berkembang ditengah keadaan politik yang tidak menentu sekaligus menjadi kelemahan *Ikhwan* sebagai suatu kesatuan dalam organisasi yang seringkali memiliki perbedaan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ikhwan* dalam konteks internasionalitasnya lebih tepat disebut sebagai gerakan ideologis yang tidak kaku ketimbang gerakan politik. “Cabang-cabang” *Ikhwan* di berbagai negara bersifat independen dan otonom. Gerakan *Ikhwan* internasional merefleksikan asosiasi ideologis dan kultural yang bersinergi dalam isu-isu besar, namun sering ditemukan perselisihan dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan domestik dan pragmatis pengurus (Vidino, 2010).

Ketika pemberangusan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir oleh rezim Nasser terjadi yang berakibat pada pembubaran dan pelarangan *Ikhwan*, penangkapan dan pembunuhan para tokoh *Ikhwan*, Arab Saudi tampil dengan menjadi pembela *Ikhwan*. Arab Saudi juga menampung ribuan aktivis yang melarikan dari Mesir, para kader *Ikhwan* ini memiliki kecakapan dalam berbagai dibutuhkan Saudi. Mereka banyak yang mengisi posisi-posisi penting baik dalam pemerintah, pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan dan kader *Ikhwan* menyebarkan pemikiran secara efektif (Al Jazeera, 2017). Semakin berkembang hingga pada 1966 *Ikhwan* dapat mendirikan cabangnya di Kerajaan Arab Saudi bernama *Al Sahwa* setelah Raja Faisal³ naik tahta. Di Bahrain, *Ikhwan* memiliki perwakilan berupa sebuah Partai Politik bernama *Al Minbar* (Masyarakat Islam Nasional Minbar), sedangkan cabang *Ikhwan* di Kuwait adalah yang tertua di negara-negara teluk, cabang ini telah berbentuk partai politik bahkan sebelum kemerdekaan Kuwait, bernama Gerakan Konstitusi Islam atau biasa disebut *Hadas* yang didirikan pada 1951 (Courtney Freer, 2015). Para kader *Ikhwan* yang berada di UEA mendeklarasikan *Jam'iyah Al Islah (Al Islah)* atau Masyarakat Perubahan pada 1974 dan diakui sebagai lembaga swadaya masyarakat secara resmi oleh pemerintah UEA. Di Oman dan Qatar para kader *Ikhwan* juga memiliki pengaruh meski tidak dapat ditemukan organisasi di kedua negara tersebut yang memiliki hubungan dengan *Ikhwan*.

Revolusi Iran dan Invasi Irak ke Kuwait menjadi titik balik hubungan *Ikhwan* dengan Saudi dan negara teluk lain, *Ikhwan* mendukung Revolusi Iran dan menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam perang teluk sedangkan Saudi bersikap sebaliknya. *Ikhwan* melancarkan kritik atas kerajaan terkait kebijakannya tersebut hingga menyebabkan pemberangusan terhadap *Al Sahwa* pada 1995 dan organisasi yang berafiliasi dengan *Ikhwan* di negara teluk lain. Peristiwa *Arab Springs* menyebabkan kekhawatiran bagi penguasa di negara-negara teluk, para kader *Ikhwan* kembali muncul untuk menyerukan perubahan dan menimbulkan pemberontakan. Kemenangan Presiden Mursi di Mesir memberikan angin segar bagi *Ikhwanul Muslimin*. Namun Presiden Mursi membuka hubungan baik dengan Iran yang menjadi musuh bagi Saudi dan sekutunya, karenanya Saudi mendukung kudeta militer dan pemerintahan baru Al Sisi di Mesir. Setelahnya pada 2014, Saudi mengumumkan bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi teroris dan disusul negara teluk lain (Al Jazeera, 2017).

Pola relasi antara *Ikhwanul Muslimin* sebagai sebuah organisasi bukan pemerintah dengan negara-negara anggota koalisi negara teluk dalam teori strukturasi dipandang sebagai *social practice*, terutama jika negara dipahami sebagai struktur dan masyarakat sebagai agensi (Giddens, 1984). Konsepsi pertama menempatkan *Ikhwan* sebagai penghubung yang berfungsi sebagai mediator antara berbagai kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang saling beinteraksi. Sebagai organisasi bukan pemerintah, *Ikhwan* dapat menyuarakan hasil dinamika hubungan antara negara dengan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat sehingga suaranya dapat dipandang sebagai sebuah refleksi, terlebih

³ Raja Arab Saudi yang berkuasa pada 1964-1975, putra ketiga Raja Abdul Aziz

Ikhwan juga memiliki media yang menjadi corong gerakannya seperti di Kuwait; Kedua, layaknya organisasi bukan pemerintah, *Ikhwan* dipandang sebagai salah satu kekuatan sosial-politik yang memiliki pengaruh pada bidang sosial, politik dan ekonomi yang berinteraksi dalam suatu periode politik tertentu. Dalam konteks hubungan masyarakat dan negara, organisasi seperti *Ikhwan* seringkali menempatkan dirinya sebagai kekuatan social-politik yang berhadapan dengan kekuatan politik negara, praktik ini terjadi sebagaimana hubungan *Ikhwan* dengan Kerajaan Saudi dewasa ini. Ketiga, *Ikhwan* dimasukkan kedalam bagian dari program kepentingan kelas dominan. Asumsinya *Ikhwan* sebagai organisasi dihuni oleh masyarakat sebagai pengurus dan anggotanya (tidak melibatkan pemerintah), namun masyarakat yang menjadi pimpinan organisasi merupakan bagian dari kelompok dominan dalam suatu negara. Dalam praktiknya di dunia, seringkali kelompok dominan memperoleh keuntungan dari negara karena negara melayani kelompok tersebut. Contoh praktik ini sulit dibuktikan secara eksplisit namun dari praktik yang terjadi hampir mirip dengan hubungan *Ikhwan* dengan Kerajaan Qatar. Meski demikian, pada kenyataannya kelompok dominan tidak selalu dapat melakukan kontrol terhadap organisasi bukan pemerintah tersebut, termasuk *Ikhwan*. Tiga konsepsi ini berdasar pada argumen Giddens yang menggunakan *society centered* dalam memandang pola hubungan masyarakat dan negara (Giddens, 1984).

Keempat, *Ikhwan* ditempatkan sebagai bagian bagian instrumen negara, namun tetap memiliki kewenangan otonom tersendiri karena negara bukan entitas monopolitik sekalipun berbentuk monarki sehingga dimungkinkan adanya kontradiksi tertentu dari negara dan tergantung pada dinamika organisasi tersebut secara kelembagaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan yang sama maupun kuatnya kontrol dari negara pada sisi regulasi dan sumber daya, menyebabkan suara yang dikeluarkan organisasi cenderung memperjuangkan kepentingan negara seperti praktik *Ikhwan* di Bahrain. Argumentasi *state centered* menjadi dasar dalam konsepsi ini (Giddens, 1984).

Konsepsi terakhir berdasar pada argumentasi Giddens dalam teori strukturasi yaitu *state and society centered*, disini *Ikhwan* telah memperoleh posisi tertentu dalam struktur masyarakat dan negara di semua negara anggota KNT. Namun perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, sebagai pelaku, agen memiliki kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung 'derutinisasi'. Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan, sumber daya, tindakan serta praktik sosial agen dalam struktur tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung agar menjadi praktik sosial yang baru. Akibatnya terjadi keusangan (*obsolescence*) struktur, perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Hal ini menjelaskan hubungan *Ikhwan* pada suatu periode waktu tertentu menjadi medium artikulasi negara dan pada suatu periode waktu tertentu menjalankan praktik resisten terhadap negara, praktik yang terjadi diseluruh negara anggota KNT (Giddens, 1984).

Kesimpulan

Fakta yang ditemukan peneliti melalui berbagai data yang telah disajikan, telah menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Dugaan sementara pada awal dimulainya penelitian dengan tegas telah dikuatkan dalam kesimpulan akhir penelitian setelah melalui tahap analisis. Struktur sebagai seperangkat relasi transformasi yang terorganisasi sebagai kelengkapan dari sistem sosial, sistem tersebut direproduksi diantara para aktor atau kolektivitas terorganisasi sebagai praktik sosial reguler telah

menjelaskan bagaimana negara-negara merespon pelanggaran HAM yang dilakukan suatu rezim dengan kecenderungan membiarkan dan mendukung pemerintahan berkuasa.

Pelanggaran HAM menjadi ancaman nyata bagi tegaknya demokrasi. Seringkali masyarakat global yang berperan sebagai agen seringkali menggabungkan preferensi politik mereka dalam memandang pelanggaran HAM yang terjadi. Aktor menurut Giddens bertanggung jawab atas suatu peristiwa dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi, artinya aktor melakukan tindakan yang bertujuan, bermaksud dan bermotif setiap aktor merupakan agen yang bertujuan (*purposive*). Sifat yang memungkinkan praktik sosial serupa dapat dijelaskan untuk berlangsung disepanjang ruang dan waktu, sehingga kedua proses ini membuat bentuk hubungan menjadi lebih sistemik. Agensi dan struktur terjalin erat dalam aktivitas atau praktik yang terus menerus dijalankan manusia. Dalam hal ini negara-negara teluk sebagai agen yang saling berintegrasi yaitu melakukan hubungan timbal balik dengan struktur kerjasama internasional dalam wadah KNT dengan *Ikhwan* melalui tiga gugus besar Giddens yaitu signifikasi, legitimasi dan dominasi sehingga dapat menjelaskan alasan negara-negara teluk dalam menyikapi pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir yang menempatkan *Ikhwan* sebagai korban.

Kerangka pemikiran yang dijabarkan diatas, peneliti melakukan analisis dan menemukan alasan dibalik sikap yang dikeluarkan koalisi negara teluk terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pasca penggulingan Presiden Mursi. *Ikhwanul Muslimin* yang memiliki gerakan politik yang aktif dan revolusioner dan menempatkan Islam sebagai solusi, terlebih ideologi *Ikhwan* yang berbeda dengan aliran Wahabi kolot yang dianut di Arab Saudi. Pergerakan *Ikhwan* tersebut menjadikannya ancaman bagi negara-negara teluk, ditambah menguatnya partai yang berafiliasi dengan *Ikhwan* di Tunisia, Mesir, Kuwait dan negara Arab lain serta adanya kader atau organ gerakan *Ikhwan* disetiap negara teluk menyebabkan *Ikhwan* dianggap menjadi “bom waktu” yang mengancam keberlangsungan monarki.

Presiden Mursi yang merupakan kader *Ikhwanul Muslimin* tidak serta merta dapat merubah struktur sosial yang terbangun sejak lama *Ikhwan* dengan anggota KNT. Meski menjadi agen yang dominan dan memiliki pengaruh untuk merubah struktur, Presiden Mursi tetap tidak mampu melakukan konsolidasi dengan agen lain secara efektif. Upaya Presiden Mursi yang melakukan kunjungan ke Arab Saudi sebagai kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden gagal memberikan keyakinan yang kuat kepada KNT bahwa *Ikhwan* bukan ancaman bagi mereka. Sebaliknya, KNT tetap berpandangan bahwa *Ikhwan* adalah ancaman berdasar pada pengalaman relasi mereka selama periode waktu sebelumnya. Struktur di KNT yang didominasi oleh negara menempatkan KNT pada kekhawatiran akan bangkitnya *Ikhwan* di negara mereka yang dapat mengancam keberlangsungan monarki. Jatuhnya Presiden Mursi di Mesir merupakan “keuntungan” bagi anggota KNT dan pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta merupakan “harga yang sepadan” sehingga KNT merasa tidak perlu untuk memperhatikan pelanggaran HAM tersebut dan lebih memilih diam serta mengeluarkan respon yan terbatas pada isu politik.

Referensi

- Abdullah, T., 2002. *Ensiklopedi Tematis Hukum Islam, Dinamika Masa Kini*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Al Jazeera and Agencies, 2013. *Aljazeera Media Network*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201381615196784361.html> [Dipetik 3 7 2018].
- Al Jazeera, 2013. *Al Jazeera Media Network*. [Daring] Tersedia pada:

- <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201373223029610370.html>
[Dipetik 4 7 2018].
- Al Jazeera, 2017. *Al Jazeera*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-brotherhood-friends-foes-170623093039202.html> [Dipetik 15 Juli 2018].
- Al Jazeera, 2017. *Al Jazeera News*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.aljazeera.com/news/2017/07/bahrain-fm-muslim-brotherhood-terrorist-group-170706140931861.html> [Dipetik 3 Agustus 2018].
- Al Jazeera's Agencies, 2013. *International reactions to Morsi's removal*. [Daring] Tersedia pada: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201373223029610370.html>
[Dipetik 1 Oktober 2017].
- Amnesty International, 2016. *Crimea: In the dark - the silencing of dissent*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/crimea-in-the-dark-the-silencing-of-dissent/> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Amnesty International, 2015. *EGYPT: REPORTERS' GUIDE – HUMAN RIGHTS IN EGYPT*, London: Amnesty International.
- Amnesty International, 2014. *Egypt: Rampant torture, arbitrary arrests and detentions signal catastrophic decline in human rights one year after ousting of Morsi*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/egypt-anniversary-morsi-ousting/> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Amnesty International, 2015. *WORLD PRESS FREEDOM DAY: JOURNALISTS UNDER ATTACK IN EGYPT*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/05/world-press-freedom-day-journalists-under-attack-in-egypt/>
[Dipetik 1 Oktober 2017].
- Amnesty International, 2016. *Five years ago, people in Bahrain rose up in protest to demand reform, but were met with violence from security forces. Since then, the authorities have continued to arrest, torture and intimidate people who speak out..* [Daring] Tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/02/7-stories-shocking-injustice-bahrain-after-arab-spring/> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Amnesty International, 2017. *TIMOR-LESTE: AMNESTY INTERNATIONAL URGES RENEWED ACTION ON PAST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa57/5922/2017/en/> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Awadi, H. a., 2004. *In Pursuit of Legitimacy, The Muslim Brothers and Mubarak 1982-2000*. London: Tauris Academic Studies.
- Courtney Freer, 2015. The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post Arab Spring. *BROOKINGS INSTITUTION*, I(7), pp. 2-5.
- Dacrema, E., 2013. New emerging balances in the post-Arab Spring: the Muslim Brotherhood and the Gulf monarchies. *Istituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale*, pp. 1-3.
- Dzakirin, A., 2015. *8 Dekade Pergulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Efendi, M., 2001. *Ensiklopedia Agama dan Flisafat*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Giddens, A., 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.

- Hassan, H., 2012. *In the Gulf, allegiance is the issue for Muslim Brotherhood*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.thenational.ae/in-the-gulf-allegiance-is-the-issue-for-muslim-brotherhood-1.401462> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Juli, S., 2007. *Federation of American Scientist*. [Daring] Tersedia pada: <http://www.fas.org/irp/world/para/mb.ht> [Dipetik 14 Juli 2018].
- Kepel, G., 2006. *Jihad: the Trail of Political Islam*. London: I. B. Tauris.
- Kompas.com, 2013. *Kronologi Kejatuhan Mursi*. [Daring] Tersedia pada: <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhammad.Mursi> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Kompas.com, 2013. *Negara-negara Arab Nyatakan Dukungan untuk Pemerintah Mesir*. [Daring] Tersedia pada: <http://internasional.kompas.com/read/2013/08/18/0139409/Negara-negara.Arab.Nyatakan.Dukungan.untuk.Pemerintah.Mesir> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Mourad, M., 2015. *Egypt sentences Muslim Brotherhood leader, others to death*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.reuters.com/article/us-egypt-court-brotherhood/egypt-sentences-muslim-brotherhood-leader-others-to-death-idUSKBN0N206A20150412> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- Nasution, H., 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Reuters, 2015. *Reuters*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.reuters.com/article/egypt-gulf-deposits/update-1-egypt-receives-6-bln-from-saudi-arabia-uae-kuwait-cenbanker-idUSL5N0XJ5HZ20150422> [Dipetik 4 Agustus 2018].
- The Hindu Business Line, 2013. *Kasturi & Sons Ltd.*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.thehindubusinessline.com/news/world/UAE-Bahrain-defend-Egypt%E2%80%99s-assault-on-Morsi-supporters/article20649185.ece> [Dipetik 4 7 2018].
- The Jordan Times, 2014. *Son of Egypt's ousted leader sentenced to 1 year*. [Daring] Tersedia pada: <http://www.jordantimes.com/news/region/son-egypt's-ousted-leader-sentenced-1-year> [Dipetik 1 Oktober 2017].
- The New York Times, 2015. *The New York Times*. [Daring] Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2015/03/02/world/middleeast/recordings-suggest-emirates-and-egyptian-military-pushed-ousting-of-morsi.html> [Dipetik 4 Agustus 2018].
- Vidino, L., 2010. *The New Moslem Brotherhood in The West*. Washington: Columbia University Press.